

IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Oleh
Yulia Vawitrie
yuliavawitrie@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini
Program Studi Administrasi Publik. Jurusan Ilmu Administrasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Pekanbaru. Indonesia.

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Social Rehabilitation is a refunctionalization and development for people with social problems to allow them for doing their social function reasonably in daily life. Person with disabilities is a person that has limitation on physical, intellectual, mental, and sensory in long-term period and have an obstacle when interact in the circle. Based on observation in the field, problem that occur in the implementation on social rehabilitation for person with disabilities is most of the families of persons with disabilities have economic condition on middle to lower class, so they don't have an education, which make them role in working is low and they got exiled from society. The purpose of this research is to analyze the implementation of social rehabilitation for person with disabilities di Pekanbaru City and factor that affect the implementation. The Theory concept used is Implementing Policy Theory by Edward III. This research also used qualitative research methods by analyzing the data descriptively. Source data that used is primary and secondary, with data collection techniques : interviews, observations, documentation. Result of this research shows that the implementation of social rehabilitation for person with disability is not effectively, this is proven by still many of these persons of disabilities not yet get social rehabilitation from government. The factors that affect the implementation is there are resource that not enough and lack of awareness of society to contribute in the process of implementation of social rehabilitation for persons with disabilities.

Keyword : Social Rehabilitation, Implementation, Persons with Disabilities, Social Welfare

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan yang akan dicapai Negara Indonesia ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materil akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia. Demikian pentingnya tujuan tersebut, sehingga bentuk-bentuk kesejahteraan yang ingin dicapai itu sering dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu dari undang-undang dasar negara misalnya, keadilan sosial yang berarti kesenjangan ekonomi dibuat sekecil mungkin karena memang sulit atau tidak mungkin dihilangkan sama sekali, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anak-anak yatim piatu, jaminan tidak terlantarnya para janda dan orang-orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan dan terhindarnya rakyat dari kelaparan serta berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Bangsa Indonesia, termasuk warga negara yang menyandang masalah kesejahteraan sosial dan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dan negara juga memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas perlu ditangani secara komprehensif oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga penyandang

disabilitas agar penyandang disabilitas dapat berfungsi secara sosial sesuai hak yang dimilikinya.

Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu hak kesejahteraan sosial yang dimiliki penyandang disabilitas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial sebagai lembaga yang menetapkan standar rehabilitasi sosial yang ada di Indonesia berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di setiap daerah. Kegiatan rehabilitasi sosial merupakan pembangunan kesejahteraan sosial yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menyebutkan Rehabilitasi Sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Refungsional dan pengembangan bagi penyandang disabilitas sangatlah penting agar tidak ada lagi kesenjangan sosial sehingga dapat tercapai tujuan akhir dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kota Pekanbaru merupakan suatu daerah yang perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertambahan penduduknya sangat pesat, sehingga Kota Pekanbaru kini telah berubah menjadi daerah yang memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan pertambahan

penduduk yang begitu pesat yang dialami oleh Kota Pekanbaru dibarengi dengan permasalahan yang biasa dihadapi oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia dan salah satunya adalah permasalahan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang saat ini juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Negara Indonesia.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang terdapat pada tahun 2016 sebanyak 860 orang. Dari data diatas tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan, karna berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru penyandang disabilitas yang mendapat pendidikan hanya sekitar 36,49% serta yang mendapat pekerjaan sekitar 45,12%. Dari jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pendidikan dan pekerjaan, maka dapat dilihat ada sekitar 54% dari jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah Kota Pekanbaru dengan masih banyaknya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ada sebagian dari para penyandang disabilitas menjadi pengemis di pinggir-pinggir jalan protokol.

Penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru saat ini, terus

meningkat jumlahnya dan taraf hidup mereka terus menurun, sehingga angka kemiskinan di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Kota Pekanbaru yang memiliki Visi untuk menjadi pusat perdagangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi khususnya tentang *“Implementasi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang

Disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Secara teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu yakni ilmu administrasi publik, khususnya ilmu dibidang implementasi kebijakan.
2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

b. Secara praktis

1. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan kajian untuk memberikan gambaran tentang pentingnya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi

Konsep Teori

George C. Edward III (Subarsono, 2005) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadi aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan subjek atau objek, suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru karna Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan instansi yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengelola penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini adalah :

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
3. Staff Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
4. Para Penyandang Disabilitas yang terdata di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang menjadi objek penelitian
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, yaitu studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna dalam perumusan teoritis dan landasan untuk analisis data

primer untuk menelaah dan melalui literatur yang tersedia, baik dari karya ilmiah dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek dan masalah penelitian. Studi lapangan, yang dimaksud untuk mendapatkan data dengan cara :

a. Observasi.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang pertama dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta terhadap objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden terpilih secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

6. Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial adalah berupa pemberian bantuan sosial, pelatihan kreativitas serta motivasi dan pembinaan lanjutan bagi penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan sebelumnya. Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga didukung oleh kebijakan, sehingga mampu menjadi pendukung yang dapat memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tersebut.

Adanya empat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (pelaksanaan) kebijakan, meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan Konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan kepada implementor dan juga kelompok sasaran kebijakan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini Dinas Sosial berkordinasi dengan pemerintah

kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data penyandang disabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Dinas Sosial juga membuka penerimaan laporan-laporan langsung dari masyarakat yang ingin melaporkan keluarganya atau tentangnya ke kantor Dinas Sosial.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum berjalan maksimal, karna penyanpaian informasi yang masih belum menyeluruh dari dinas sosial sebagai dinas yang melaksanakan dan juga kurangnya keterbukaan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan ini juga menyulitkan Dinas Sosial untuk merangkul para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Sumberdaya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III ada empat sumber daya yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya pendukung seperti perlengkapan.

a. Sumberdaya manusia merupakan bagian penting untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena merekalah yang nantinya akan menjalankan pelaksanaan

kebijakan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diperlukan sumberdaya manusia yang bisa memahami dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dengan baik untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut, sehingga kualitas setiap pelaksanaan harus diutamakan. Sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengimplementasikan kebijakan atau dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwa implementor yang menjadi pelaksana rehabilitasi sosial telah memiliki kualitas yang baik untuk menjalankan pelaksanaan rehabilitasi sosial, tetapi dengan jumlah personil yang tidak mencukupi mengakibatkan pelaksanaan rehabilitasi sosial ini tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas belum dapat terlihat pencapaiannya.

- b. Sumberdaya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum mencukupi untuk memenuhi target 50 orang pertahunnya yang di rehabilitasi dan di beri bantuan sosial, tapi

dengan adanya lembaga-lembaga dan perusahaan swasta yang sukarela untuk memberikan bantuan sosial maka Dinas Sosial sebagai fasilitator akan membantu menyeleksi peserta yang akan di berikan bantuan sosial.

- c. Sumberdaya Peralatan yang digunakan dalam hal ini adalah tempat pelatihan dan alat-alat pelatihan. Setelah adanya penelitian dapat dilihat bahwa peralatan yang mendukung pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas belum memadai. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi yang berupa kegiatan pelatihan masih sering terkendala karena belum adanya tempat yang tetap dan alat-alat yang di miliki oleh dinas sosial.

3. Disposisi

Mendisposisikan kebijakan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial ini dilaksanakan oleh personil-personil yang sudah berstatus pegawai negeri, setelah itu dinas sosial berikan pelatihan untuk lebih menjelaskan kepada mereka terkait kerja-kerja, kebijakan-kebijakan serta apa-apa saja yang menjadi tujuan dari setiap pelaksanaan. Sehingga dalam dapat disimpulkan bahwa dengan proses ini dinas sosial ingin mendisposisikan setiap kebijakan dengan baik dan agar mudah difahami oleh personil-personil yang nantinya akan menjadi implement dari suatu kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber yang mengimplemntasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementor*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya.

Implemanatasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti strutktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Dari pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas oleh dinas sosial yang diwenangkan kepada seksi rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang langsung memegang penuh pelaksanaannya.

Hasil observasi penulis tentang penetapan SOP dan kriteria penerima rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sudah ter-rancang dengan mengidentifikasi kondisi lapangan dan juga kondisi masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Penyebaran tanggung jawab yang dari setiap aktifitas dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini dirancang sebaik-baiknya agar tidak terjadi alur yang panjang dan waktu yang lama, karna dalam mengimpelementasikan kebijakan struktur birokrasi sangat

berpengaruhi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

1. Sumberdaya Manusia, Anggaran dan Peralatan

Sumberdaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, karena dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas dibutuhkan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia, anggaran dan peralatan. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum mencukupi untuk bisa menjalankan setiap tugas dengan baik, agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara kualitas Dinas Sosial telah memilih personil-personil yang bisa bekeja dibidangnya dengan baik.

Sumberdaya anggaran dan peralatan menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam segi peralatan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas masih sangat minim dikarnakan dari segi anggaran juga masih belum mencukupi untuk memenuhi peralatan yang dibutuhkan, terutama untuk membangun sebuah pusat

pelatihan rehabilitasi. Dari wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial juga dapat disimpulkan bahwa sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan belum bisa mencukupi untuk Dinas Sosial melaksanakan rehabilitasi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Partisipasi Keluarga Penyandang Disabilitas Partisipasi

Menurut Isbandi, merupakan keikutsertaan suatu kelompok dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah. Secara jelasnya partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari suatu kelompok atau seseorang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu adanya peran dari setiap elemen untuk membuat kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan. Hal ini juga berpengaruh dalam implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.

Kurangnya partisipasi keluarga peserta dalam program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini merupakan salah satu

faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ini, karna penting bagi para peserta untuk mendapat dukungan dari keluarganya agar itu juga menjadi salah satu motivasi bagi mereka untuk semangat mengikuti kegiatan rehabilitasi, karna salah satu tujuan adanya kegiatan rehabilitasi sosial ini adalah untuk memperdayakan peserta penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini pelaksanaannya diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan maksimal, karna pertama dalam segi komunikasi dinas sosial masih belum bisa menyebarkan informasi terkait adanya kegiatan rehabilitasi kepada kelompok-kelompok sasaran yang nantinya akan menjadi peserta dalam setiap kegiatan, kedua sumberdaya (manusia, anggaran dan peralatan) masih belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial karna masih minimnya jumlah personal dan anggaran serta peralatan yang dimiliki dinas sosial. Ketiga disposisi yang merupakan proses penurunan kewenangan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam

kegiatan rehabilitasi sosial ini sudah lebih baik dan dapat difahami oleh pelaksana sehingga tidak menjadi kendala. Dan keempat struktur birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial telah disusun dengan baik untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penyampaian informasi maupun dalam menurunkan suatu keputusan dan rancangan SOP yang jelas untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ini.

2. Dari hasil wawancara dan penemuan di lapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ini yaitu sumberdaya (Sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan) dan Kurangnya partisipasi keluarga peserta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Kota Pekanbaru yang masih minim partisipasinya dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut sehingga secara pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Rencana awal dirumuskannya kegiatan rehabilitasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, agar tidak ada ketimpangan sosial yang terdi ataupun diskriminasi bagi para penyandang disabilitas yang juga memiliki peran serta kedudukan yang sama di masyarakat.

Saran

Pada kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya bagian Rehabilitasi Sosial bagi Para Penyandang Disabilitas, yaitu :

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya bagian rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, harus lebih berperan aktif lagi untuk memperbaiki pola komunikasi agar dengan jumlah personil yang minim, tapi tetap bisa menyebarkan informasi keseluruh penyandang disabilitas yang menjadi kelompok sasaran. Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ini juga harus lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan rehabilitasi ini lebih baik dan masyarakat dapat memahami bahwa betapa pentingnya kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini bagi individu maupun bagi lingkungan masyarakat itu sendiri. Serta juga merangkul perusahaan atau instansi swasta untuk mendukung kegiatan rehabilitasi ini, agar para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru juga bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kota Pekanbaru dengan lebih meningkatkan lagi proses disposisi dan struktur birokarsi yang ada.
2. Memanfaatkan sumberdaya dengan mencari atau menggali kembali sumberdaya-sumberdaya

baik itu sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan yang ada agar pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi para Penyandang Disabilitas ini dapat berjalan dengan maksimal, serta kembali menumbuhkan kesadaran keluarga agar dapat berpartisipasi secara aktif untuk bisa bekerja sama membantu pemerintah dalam mensukseskan kegiatan rehabilitasi sosial khusus bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru, agar mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekanbaru khususnya dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga yang penyandang disabilitas baik secara menatal mapun secara finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Caplin. J.P. 2014 . *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : Rajawali Press
- Danin, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Irfan, Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- Latief, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Ramadja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 1997. *Kamus Konseling*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses*

- dan Analisis Kebijakan*). Yogyakarta : Ombak.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Public : Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan (Dasar Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Inter Media.
- _____, _____. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.